

INVESTASI DAN PARADOKS DUNIA KERJA INDONESIA: AGENDA MEMASUKI ERA LIBERALISASI EKONOMI PASAR*

H. Bomer Pasaribu**

Abstract

Indonesia's economy during the 25 years of The First Long Term Development (PJP I) has been a great success so that World Bank granted two accreditation to Indonesia i.e. "miracle economy" and "newly industrializing economy".

The structural transformation of Indonesian economy from agrarian economy into industry wick has been successful in PJP I will continue and is presumed to be developing quicker and more extensively in PJP II wick is non other than the era of industrialization and liberlization of market economy. A great success wick also contains structural imbalance in employment and distribution of wealth and income together with a number of problems wick accompany the tendency of increased investments such as the "cancer" of high cost economy, ICOR, labor elasticity and elasticity of capital, disparities of wage and high unemployment rate.

All of these constitute homework wick need to be handled seriously together with reformation of policies in order to guarantee increased competitiveness if we are to survive in the era of hyper-competition. In addition to this, we can be sure that the proportion of paid worker and the multiplied of participation rate of women workers in the labor market will result in increasingly complex creation of jobs and industrial relations and the problems of Indonesia's labor world in general.

The era of industrialization and market economy liberalization demands improved quality of human resources, in particular the workers, through education and training, improved nutrition and

* Cuplikan (dengan revisi) dari Tesis S2 penulis pada Program Pascasarjana IPB, Bogor

** Anggota FKP DPR/MPR-RI, dan sedang mengikuti Program S3 (Doctor), Studi Pembangunan Wilayah, Program Pascasarjana, IPB, Bogor

health, safety and effectivity of industrial relatins and the up-holding of human rights and economic rights of the workers. In the end, all of these merge into the guarantee of the respect for people dignity and self esteem, wich constitute something very important for every people as a "primary good". People at the same time is the subject and the object of development, is the beginning and the end of development and is the reality and the center of development (people-centered development).

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi Indonesia telah membuktikan satu sukses besar bila ditinjau dari tranformasi struktur ekonomi selama PJP I khususnya ditinjau dari pendekatan Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor pertanian yang pada awal Pelita I (1969) memberikan kontribusi terbesar pada pembentukan Produk Domestik Bruto yakni sekitar 35,8% telah menurun dengan signifikan menjadi hanya 17,22% pada 1993, suatu tingkat penurunan lebih dari 50%. Sebaliknya sektor industri manufaktur yang hanya memberikan kontribusi 4,6% terhadap PDB (1969) telah meningkat dengan sangat tajam menjadi 23,21% (1993), suatu peningkatan lima kali lipat.

Namun sukses besar perubahan struktur ekonomi dari pendekatan PDB ini mengandung ketimpangan struktural yang juga cukup signifikan ditinjau dari segi pendekatan *employment*. Artinya perubahan struktural yang signifikan ditinjau dari pendekatan PDB itu, tidak diikuti secara sepadan dengan perubahan struktural di dalam *employment*. Sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja 78,4% pada 1969 ternyata, sekalipun kontribusinya terhadap PDB telah menurun hanya tinggal 50%, namun angkatan kerja yang masih terpaksa terserap di dalamnya masih tetap sangat besar proporsinya, yakni dari 78,4% pada 1969, hanya turun menjadi 51,1% pada 1993. Sebaliknya sektor industri manufaktur sekalipun kontribusinya terhadap pembentukan PDB telah meningkat lima kali lipat, namun tenaga kerja yang terserap di dalamnya hanya mengalami kenaikan yang tidak signifikan yakni dari 3,7% (1969) menjadi 11,4% (1993).

Akibatnya perekonomian Indonesia selama PJP I ditinjau dari

segi *employment* tetap didominasi oleh sektor informal dan mereka yang hidup di dalamnya cenderung berada dalam keadaan marginal, serta tingkat "pengangguran total" (terbuka, terselubung dan setengah pengangguran) yang cenderung meningkat makin menuju "lampu merah". Artinya kesuksesan perubahan struktur ekonomi telah menyisakan suasana mis-alokasi sumber daya manusia yang cukup besar yang harus dihadapi dengan penuh optimisme dan kerja keras.

Ditambah dengan persoalan efisiensi dan produktivitas ekonomi Indonesia, berkaitan dengan penyakit "kanker" *high cost economy* dan ICOR yang cenderung meningkat, ketimpangan pasar kerja, elastisitas tenaga kerja dan modal, persoalan *migrant workers*, kesemuanya menuntut penanganan sungguh-sungguh untuk memelihara kelanjutan sukses pembangunan merupakan agenda besar memasuki era liberalisasi ekonomi pasar yang penuh dengan peluang dan tantangan. Dihubungkan dengan sukses besar ekonomi Indonesia termasuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan total investasi yang terus melonjak sekitar 8.000% periode 1980-1994, maka rangkaian keadaan ketenagakerjaan tersebut di atas terasa seperti saling berlawanan yang mencerminkan adanya semacam "Paradoks Dunia Kerja Indonesia".

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mempelajari kaitan investasi, penggunaan teknologi dengan pertumbuhan produktivitas, baik produktivitas tenaga kerja maupun produktivitas modal.
2. Untuk mempelajari kebijakan investasi serta *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), hubungannya dengan teknologi dan *employment*, elastisitas modal (*capital elasticity*) dan elastisitas tenaga kerja (*labor elasticity*) serta daya serap pasar kerja.
3. Untuk mempelajari aspek-aspek *employment*, tingkat pengangguran (terbuka dan terselubung), produktivitas pekerja dan tingkat upah serta distribusi pendapatan.

II. KECENDERUNGAN INVESTASI DAN ICOR

A. PERTUMBUHAN INVESTASI

Dengan menggunakan data BPS yakni dari rincian PDB, besarnya investasi (berdasar harga berlaku) terus meningkat

sepanjang periode 1980-1984. Investasi diperkirakan sama dengan PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) ditambah besarnya stok. Dalam publikasi BPS, output suatu sektor menjadi barang modal (*capital goods*) dinyatakan sebagai PMTB. Sedangkan output setengah jadi dan belum digunakan dinyatakan sebagai stok (*inventory*).

Menurut *System of National Account* (UN) 1968, jumlah PMTB dan perubahan stok menggambarkan investasi fisik domestik pada tahun tertentu. Pendekatan melalui PMTB merupakan metode tidak langsung (*indirect method*) disebut pendekatan arus barang (*commodity flow approach*). Jumlah investasi dapat dirinci berdasarkan institusi yang melaksanakannya yakni: pertama, Pemerintah (pusat dan daerah); kedua, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/ D) dan; ketiga, investasi swasta dan rumah-tangga.

Model makro ekonomi dalam porsi investasi terhadap PDB tergambar dalam persamaan:

$$Y = C + G + I + (X-M) \dots \dots \dots (II.1)$$

dimana:

- Y = Pendapatan Nasional atau PDB
- C = Konsumsi Rumah tangga
- G = Pengeluaran Pemerintah
- I = Investasi
- X = Ekspor
- M = Impor

Total investasi dari 1980-1994, terlihat dalam **Tabel 1** yang cenderung terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 1980 sebesar Rp. 9.485 milyar menjadi Rp. 755.913 milyar (1994) meningkat sekitar 8000%. Diantaranya investasi swasta meningkat lebih signifikan dari hanya Rp.4.857 milyar (1980) melonjak menjadi Rp.630.469 milyar (1994) berarti meningkat lebih 13.100%.

Sedangkan besarnya porsi pengeluaran investasi terhadap PDB dapat diikuti pada **Tabel 2**. Tabel ini selain menggunakan dasar harga berlaku kurang realistis, karenanya dilengkapi dengan porsi investasi terhadap PDB atas dasar harga konstan 1993 yang lebih realistis. Dari **Tabel 2** tersebut kelihatan kecenderungan porsi investasi terhadap PDB yang pada umumnya terus meningkat dari 21,75 (1980) menjadi 35,75 (1984). Sehingga menurut ukuran atau kriteria yang lazim dikenal dalam ilmu Ekonomi Pembangunan termasuk seperti diutarakan

oleh W.W.Rostow, Indonesia sedang mengalami proses percepatan industrialisasi dalam era tinggal landas (*take off*).

TABEL 1

**REALISASI INVESTASI OLEH INVESTOR :
PEMERINTAH, BUMND, DAN SWASTA/RUMAH TANGGA, 1980-1994
(Rp. juta)**

TAHUN	INVESTASI			
	PEMERINTAH	BUMND	SWASTA/RT	TOTAL
1980	1.000.314	3.627.268	4.857.419	9.485.001
1981	1.001.124	4.095.267	6.456.606	11.552.997
1982	1.125.406	4.357.645	7.983.952	13.467.003
1983	1.135.481	5.162.258	18.014.263	24.312.002
1984	1.103.369	5.907.291	17.109.342	24.120.002
1985	1.221.218	6.223.744	19.673.038	27.118.000
1986	1.369.518	6.744.772	22.224.713	30.339.003
1987	1.459.521	7.045.636	29.181.839	37.686.996
1988	1.443.127	7.111.223	34.616.649	43.170.999
1989	1.552.643	7.280.099	49.646.257	58.478.999
1990	2.303.337	7.314.246	55.172.415	64.789.998
1991	2.589.737	7.390.133	70.049.125	80.028.995
1992	3.528.703	7.435.199	80.547.093	91.510.995
1993	4.556.502	7.508.503	97.509.993	109.574.998
1994	4.971.739	7.878.660	117.426.599	130.276.998
TOTAL	30.361.739	95.081.944	630.469.303	755.912.986

Sumber: Diolah Dari Berbagai Laporan BPS

TABEL 2**PORSI INVESTASI TERHADAP PDB ATAS DASAR
HARGA (ADH) BERLAKU DAN KONSTAN 1993
1980-1994**

TAHUN	PORSI INVESTASI TERHADAP PDB	
	ADH BERLAKU	ADH KONSTAN
1980	20,93	21,75
1981	21,48	22,54
1982	22,73	25,21
1983	31,32	35,67
1984	26,49	32,26
1985	27,56	35,52
1986	28,24	35,29
1987	29,09	33,28
1988	28,34	29,25
1989	32,56	30,12
1990	30,73	30,64
1991	32,02	30,82
1992	32,41	31,69
1993	33,23	33,23
1994	34,35	35,73

Sumber: Diolah Dari Berbagai Laporan BPS

**B. GAMBARAN ICOR (INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT
RATIO)**

Instrumen ICOR digunakan untuk menghitung kebutuhan investasi (dalam satuan unit moneter) guna meningkatkan output (PDB dalam satuan unit moneter). Dalam perhitungan ini nilai investasi maupun PDB harus dinyatakan dalam harga konstan guna menghilangkan pengaruh fluktuasi harga dalam ukuran ICOR.

Rumus ICOR yakni perbandingan antara jumlah investasi dengan output (PDB) selama periode tertentu:

$$ICOR = \sum I_t / \sum \Delta Y_t \dots \dots \dots (II.2)$$

$\sum I_t$: Total Investasi dari 1989-1994

$\sum \Delta Y_t$: Jumlah Penambahan PDB dari 1989-1994

Dengan menggunakan rumus tersebut dapat diketahui bahwa ICOR Nasional selama periode 1989-1994 adalah sekitar 4,3. Berarti untuk meningkatkan 1 unit moneter output (PDB) nasional diperlukan sebesar 4,3 unit moneter investasi.

Penghitungan ICOR untuk sektor industri (ICOR Industri) pernah diadakan 2 kali oleh BPS (keduanya tidak dipublikasikan) yakni 1983 dan 1993 masing-masing menggunakan *data series* hasil survei tahunan Industri Besar dan Sedang 1975-1981 dan 1985-1990 disertai survei khusus barang-barang modal.

Rumus ICOR standar yang digunakan adalah seperti tercantum pada halaman 7. Hasil perhitungan nilai ICOR sektor industri berdasarkan metode akumulasi investasi dengan Lag=1, investasi termasuk selisih stok (bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi) terlihat pada Tabel 3. Dalam perhitungan ini masing-masing dilakukan untuk 2 digit ISIC (*International Standard Industrial Classification of All Economic Activities*) sebagaimana klasifikasi kelompok besar industri dapat diikuti pada lampiran.

Dari Tabel 3 dapat diketahui ICOR Industri untuk seluruh sektor untuk periode 1980-1990 adalah 6,04. Berarti untuk meningkatkan satu unit output dibutuhkan 6,04 unit investasi sangat meningkat dibanding dengan periode sebelumnya 1979-1983 yang hanya memerlukan 4,08 unit investasi. Hal mana mencerminkan kemungkinan penggunaan teknologi yang lebih tinggi atau investasi yang semakin padat modal maupun tingkat inefisiensi yang meningkat atau tingkat produktivitas investasi yang menurun, karena kebalikan dari ICOR ($1/ICOR$) adalah mencerminkan tingkat produktivitas modal.

Perkembangan ICOR tersebut mencerminkan bahwa kegiatan investasi di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung semakin mahal. Hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari kecenderungan meningkatnya *high cost economy* yang agaknya makin cenderung menjadi penyakit "kanker" yang harus diatasi secara konstantin dan konsekuen di dalam menghadapi *hyper competition* era pasar bebas. Karena era pasar bebas telah mengentalkan sejumlah paradigma baru seperti tercermin dalam jargon: "efisien atau mati, kompetitif atau tersingkir".

Misalnya ICOR Industri makanan, minuman dan tembakau

**RUMUS ICOR STANDAR YANG DIGUNAKAN
DALAM STUDI INI**

RUMUS

$$ICOR = \frac{1}{n} \sum_{t=t_1}^{t=t_2} (Y_{t+s} - Y_{t+s-1}) \dots\dots\dots (I)$$

dimana : $n = t_2 - (t_1 + s)$

$s = 0, 1, 2, 3, 4$ (lag)

$$ICOR = \frac{1}{n} \sum_{t=t_1}^{t=t_2} (0,1 I_{t-1} + 0,9 I_t) / (Y_{t+s} - Y_{t+s-1}) \dots\dots\dots (II)$$

dimana : $n = t_2 - (t_1 + s)$

$s = 0, 1, 2, 3, 4$ (lag)

$$ICOR = \frac{1}{n} \sum_{t=t_1}^{t=t_2} (0,1 I_{t-2} + 0,2 I_{t-1} + 0,7 I_t) / (Y_{t+s} - Y_{t+s-1}) \dots (III)$$

dimana : $n = t_2 - (t_1 + s)$

$s = 0, 1, 2, 3, 4$ (lag)

TABEL 3

NILAI ICOR SEKTOR INDUSTRI BERDASARKAN
METODE AKUMULASI INVESTASI DENGAN LAG=1

ISIC	PERIODE		
	1979-1983	1984-1988	1989-1990
(1)	(2)	(3)	(4)
31	2,14	3,35	2,86
32	4,56	9,42	7,17
33	4,52	10,69	8,41
34	5,62	14,52	10,17
35	5,07	9,74	7,39
36	6,81	11,05	8,74
37	4,48	5,97	7,15
38	3,50	6,08	5,65
39	1,90	2,05	1,08
TOTAL	4,08	7,48	6,04

Catatan : Investasi termasuk selisih stok
(bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi)

Sumber: Bomer Pasaribu, diolah dari data hasil Survey Industri
Besar / Sedang BPS

(ISIC 31) meningkat dari 1,78 periode 1979-1983 menjadi 2,48 periode 1984-1988. Demikian juga Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 32), industri kayu dan barang-barang dari kayu (ISIC 33), industri kertas dan barang-barang percetakan, penerbitan (ISIC 34) pada periode sama meningkat masing-masing dari 3,97 menjadi 6,64; 4,00 menjadi 7,00; dan 4,67 menjadi 8,34.

III. PERKEMBANGAN ELASTISITAS MODAL (*CAPITAL ELASTICITY*)

Elastisitas modal (*capital elasticity*) merupakan persentase perubahan terhadap pendapatan modal sebagai akibat dari perubahan pendapatan nasional (PDB). Sedangkan elastisitas tenaga kerja (*labor elasticity*) mencerminkan persentase perubahan yang terjadi terhadap pendapatan tenaga kerja sebagai akibat dari perubahan PDB.

Elastisitas modal dan elastisitas tenaga kerja 1975, 1980, 1985, 1990 dapat diketahui dengan menggunakan metode SNSE (Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia). Pendekatan untuk fungsi produksi adalah teori Euler dan fungsi produksi Cobb-Douglas.

Fungsi produksi homogen berderajat 1 (*liniar homogeneous production function*):

$$Y = f(L, K) \dots \dots \dots (III.1)$$

Selanjutnya dengan teori persaingan pasar sempurna maka dengan menggunakan teori Euler, fungsi produksi tersebut (III.1) dapat dirumuskan menjadi:

$$Y = (\delta y / \delta L)L + (\delta y / \delta K)K \dots \dots \dots (III.2)$$

dimana:

- w : *Wage rate* (tingkat upah)
- r : *rate of return and capital* (tingkat hasil modal)
- p : *price* (harga produk/ komoditas)

Bila fungsi produksi suatu sektor mengikuti fungsi produksi Cobb-Douglas, rumusnya adalah:

$$Y = TL^a K^{(1-a)} \dots \dots \dots (III.3)$$

maka *marginal product* masing-masing produksi adalah:

$$(\delta y / \delta L) = a T L^{(a-1)} K^{(1-a)} \dots \dots \dots (III.4)$$

dan:

$$(\delta y / \delta k) = (1-a) T L^a K^{-(a)} \dots \dots \dots (III.5)$$

Sehingga bila diteruskan akan ditemukan:

$$(wL/py) = a \dots \dots \dots (III.6)$$

dan dengan cara yang sama ditemukan:

$$(rK/py) = (1-a) \dots \dots \dots (III.7)$$

Dua persamaan terakhir ini memperlihatkan suatu sektor yang mengikuti fungsi produksi Cobb-Douglas, maka kontribusi masing-masing faktor produksi terhadap Total pendapatan adalah sama dengan parameter fungsi tersebut yakni:

Pertama: Parameter a (III.6) juga menunjukkan elastisitas tenaga kerja (*labor elasticity*) = $(\delta y / y)(\delta L / L)$.

Kedua: Parameter $(1-a)$ (III.7) juga menunjukkan elastisitas modal (*capital elasticity*) = $(\delta y / y)(\delta K / K)$.

Tabel 4 menunjukkan elastisitas modal (*capital elasticity*) secara sektoral periode 1975-1990. Dengan pendekatan tersebut, dari Tabel 4, dapat diketahui bahwa elastisitas modal menurun dari 0,62 pada 1975 menjadi 0,53 pada 1990. Artinya setiap peningkatan modal sebesar 1%, *ceteris paribus* akan meningkatkan PDB (Y) sebesar 0,62% pada 1975 dan 0,53% pada 1990.

Sedangkan di lain pihak elastisitas tenaga kerja (*labor elasticity*) Indonesia berubah dari 0,38 pada 1975 menjadi 0,47 pada 1990. Artinya setiap peningkatan tenaga kerja sebanyak 1%, *ceteris paribus* akan meningkatkan PDB Indonesia (Y) sebesar 0,38% pada 1975 dan sebesar 0,47% pada 1990. Dalam hubungan ini jumlah elastisitas tenaga kerja dan elastisitas modal harus selalu satu, menunjukkan bahwa setiap peningkatan elastisitas tenaga kerja akan diikuti pula penurunan elastisitas modal dan demikian pula sebaliknya. Dalam kaitan ini dapat dipahami bahwa kegiatan investasi di Indonesia cenderung terus menerus semakin mahal yang sekaligus juga bermakna bahwa penciptaan setiap lapangan kerja baru akan semakin sulit dan mahal pula.

Kecenderungan penurunan elastisitas modal terlihat pada 14 sektor masing-masing subsektor sebagian cukup mencolok antara lain sektor: pertanian tanaman pangan dari 1975 ke 1990 menurun yakni dari 0,43 menjadi hanya 0,27; kehutanan dan perburuan 0,81 menjadi 0,74; pertambangan dan penggalian dari 0,72 menjadi 0,80; perdagangan besar, eceran dan jasa penunjang dari 0,59 menjadi 0,27; Bank dan asuransi dari 0,96. Sedangkan yang mengalami

Sumber : Pasaribu, Bomer. 1995. Diolah dari berbagai sumber data
BPS dan DEPNAKER

TABEL 4
ELASTISITAS MODAL MENURUT SEKTOR
1975-1990

NO	SEKTOR	1975	1980	1985	1990
1.	Pertanian Tanaman Pangan	0,43	0,37	0,31	0,27
2.	Pertanian Tanaman Lainnya	0,69	0,66	0,52	0,26
3.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	0,80	0,76	0,76	0,62
4.	Kehutanan dan Perburuan	0,81	0,83	0,86	0,74
5.	Perikanan, Pengeringan dan Penggaraman	0,73	0,64	0,71	0,64
6.	Pert. Batubara dan Bijih Logam, Minyak & Gas Bumi	0,99	0,98	0,96	0,95
7.	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,72	0,53	0,58	0,60
8.	Industri Makanan, Minuman dan tembakau	0,75	0,74	0,70	0,67
9.	Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian dan Kulit	0,47	0,43	0,46	0,47
10.	Industri Kayu, Barang Dari Kayu & Konstruksi	0,56	0,58	0,50	0,58
11.	Industri Kertas, Percetakan, Alat Angkutan dari Logam dan Lainnya	0,66	0,67	0,68	0,59
12.	Industri Kimia, Pupuk, Hasil Tanah Liat, Semen dan Industri Logam Dasar	0,72	0,68	0,85	0,78
13.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,68	0,63	0,61	0,71
14.	Perdagangan Besar, Eceran dan Jasa Penunjang	0,59	0,49	0,44	0,27
15.	Angkutan dan Pergudangan	0,67	0,66	0,70	0,69
16.	Restoran	0,54	0,70	0,73	0,69
17.	Perhotelan	0,51	0,45	0,52	0,57
18.	Angkutan Darat	0,69	0,60	0,60	0,78
19.	Angkutan Udara, Air dan Komunikasi	0,68	0,69	0,62	0,60
20.	Bank dan Asuransi	0,96	0,91	0,89	0,89
21.	Real Estate & Jasa Perusahaan, Pemerintahan, Pertahanan, Pendidikan, Jasa Sosial, Film & Rekreasi	0,12	0,11	0,08	0,10
22.	Jasa Perorangan, Rumahtangga dan lainnya	0,06	0,06	0,25	0,35
JUMLAH :		0,62	0,62	0,57	0,53

Sumber: Diolah dari berbagai sumber data BPS

kenaikan hanya 8 sektor, antara lain: industri kayu; barang dari kayu dan konstruksi dari 0,56 menjadi 0,58; industri kimia, pupuk, hasil tanah liat, semen dan industri logam dasar dari 0,72 menjadi 0,78; perhotelan dari 0,51 menjadi 0,57; jasa perorangan dan rumahtangga dari 0,06 menjadi 0,35.

Keadaan penurunan elastisitas modal secara total ini memberikan implikasi dalam merumuskan kebijakan yang menuntut suatu kearifan maksimum dari para pengambil keputusan dan penentu politik ekonomi nasional terutama pemerintah, DPR dan kekuatan infrastruktur politik termasuk serikat pekerja dalam menghadapi pilihan yang sulit dalam peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja dalam keadaan *labor surplus economy* yang secara logis membutuhkan arah kebijakan *full employment* (kesempatan kerja penuh). Politik ekonomi *full employment* secara jelas menurut penulis belum pernah secara tegas didisain dan dirinci secara terukur dan terjadwal di dalam agenda pembangunan Indonesia yang agaknya memasuki PELITA VII dan era liberalisasi ekonomi pasar agaknya perlu menjadi prioritas agenda kerja Indonesia.

IV. PENINGKATAN ICOR, TEKNOLOGI DAN LAPANGAN KERJA: PARADOKS DUNIA KERJA INDONESIA

Perkembangan ICOR seperti terlihat pada Tabel 3 mencerminkan dari waktu ke waktu khususnya pada PELITA VI dan dapat diperkirakan memiliki kecenderungan yang sama pada PELITA VII bahwa peningkatan kebutuhan investasi diikuti dengan semakin mahalnya investasi dari periode sebelumnya. Kemampuan menghasilkan peningkatan satu unit PDB semakin membutuhkan investasi yang lebih besar (ICOR yang semakin tinggi). Semakin tingginya ICOR dan rendahnya produktivitas dapat disebabkan karena faktor inefisiensi yang makin tinggi yang agaknya juga tidak terlepas dari faktor penyakit *high cost economy*.

Dari Tabel 3 dapat diikuti bahwa ICOR industri (total) telah meningkat dari 4,08 (1979-1983) menjadi 6,04 (1980-1990). Secara sektoral terlihat bahwa: industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 31) meningkat dari 2,14 menjadi 2,86; industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 32) dari 4,5 menjadi 7,17; industri kayu dan produk kayu (ISIC 33) meningkat hampir 2 kali lipat dari 4,52 menjadi 8,41; demikian juga industri kertas dan barang-barang cetakan penerbitan (ISIC 33) dari 4,52 menjadi 8,41; industri kimia, minyak bumi,

batubara, karet dan plastik (ISIC 35) dari 5,07 menjadi 7,39; industri barang-barang galian bukan logam (ISIC 36) dari 6,81 menjadi 8,34; industri logam dasar dan *basic metal industry* (ISIC 37) dari 4,48 menjadi 7,15; industri barang logam, mesin dan perlengkapan (ISIC 38) dari 3,50 menjadi 3,65; dan industri pengolahan lainnya (ISIC 39) satu-satunya yang menurun dari 1,90 menjadi 1,08.

Tingginya ICOR dapat pula disebabkan oleh faktor teknologi yang mencerminkan peralihan investasi dan teknik produksi yang padat karya bergeser ke teknik produksi yang lebih banyak mendaya gunakan mesin dan padat teknologi. Jika hal terakhir ini yang terjadi dapat berakibat positif kepada peningkatan kualitas produk dan daya saing.

Namun sebaliknya peningkatan ICOR dalam kecenderungan seperti itu bisa menjadi "malapetaka" bagi dunia kerja karena akan menghambat laju perluasan kesempatan kerja. Terlebih-lebih lagi bila teknologi impor tersebut karena bukan diciptakan dan dikembangkan dalam negeri sendiri hanya akan meningkatkan ketergantungan kepada luar negeri disertai dengan makin banyaknya tenaga kerja asing (TKA) "menyerbu" pasar kerja Indonesia. "Serbuan" TKA tersebut sejalan pula dengan makin meningkatnya pinjaman luar negeri, investasi asing langsung (*foreign direct investment*) maupun tidak langsung (*foreign indirect investment*) melalui *port folio* pasar modal.

Studi proyeksi yang pernah dilakukan Pasaribu, 1995, menggambarkan bahwa kecenderungan terus meningkat masuknya TKA bila diasumsikan tetap seperti tiga tahun terakhir ini maka pada PELITA VII sampai tahun 2000 karena makin meningkatnya aplikasi pasar bebas sejalan dengan pertujuan AFTA dan WTO, masuknya pekerja asing akan menunjukkan "lampu merah" bagi pasar kerja Indonesia maupun bagi defisit transaksi berjalan khususnya defisit jasa-jasa *non-factor* termasuk yang bersumber dari pengurusan devisa oleh pekerja asing, seperti terlihat pada Tabel 5.

TABEL 5

PROYEKSI TKA DI INDONESIA

TAHUN	JUMLAH	TOTAL UPAH (US\$. MILY)
1995	57.159	2,40
1996	78.296	3,29
1997	107.265	4,51
1998	146.953	6,17
1999	201.325	8,45
2000	275.815	11,58

Sumber : Pasaribu, 1995. Proyeksi berdasarkan berbagai data dari BPS dan DEPNAKER.

Masuknya pekerja asing di Indonesia adalah merupakan hal sukar dibendung karena adanya semacam hukum : "Dimana terjadi booming, ekonomi pasar semakin bebas dan terbuka serta masuknya modal asing makin meningkat akan diikuti pula oleh masuknya tenaga kerja asing." Oleh karena itu yang dapat diusahakan adalah menyediakan tenaga kerja trampil, enjiner, manajer dan kaum profesional sehingga tenaga kerja asing tidak terlalu dominan. Sementara ini ada semacam "rumus" pasar kerja Indonesia yang kami sebut sebagai "Rumus 10 : 3 : 2".

Artinya tiap 10 pencari kerja tersedia 3 lapangan kerja produktif tapi hanya bisa diisi oleh 2 tenaga kerja Indonesia. Sehingga sisanya menjadi ajang rebutan oleh TKA (enjiner, profesional manajer).

Bila dibandingkan dengan pengiriman jasa tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang jumlahnya sekitar 1,5 sampai 2 juta orang pada umumnya lebih didominasi oleh pekerja sektorinformal seperti pembantu rumah tangga maupun pekerja kasar maka hasilnya hanyalah sekitar US\$ 0,6 milyar per tahun. Dalam persoalan *migrant workers* ini, pasar kerja Indonesia yang bercirikan *labor surplus economy* justru diserbu oleh TKA mencerminkan suasana semacam paradoks dalam pasar kerja kita yang ditandai dengan sifat-sifat dualistik (pasar kerja domestik & internasional, formal & informal, terdidik & tidak terdidik, pasar kerja primer & skunder).

Migrant workers dari segi fisik dan kuantitatif terdapat surplus dalam arti jasa tenaga kerja yang kita kirim ke luar negeri jauh lebih banyak (sekitar 2 juta orang) dibanding dengan TKA yang masuk

sekitar hanya 60.000 orang. "Berlawanan" dengan itu dari segi devisa dan kualitatif justru terdapat defisit karena devisa masuk dari TKI hanya US\$ 0,6 milyar sedangkan devisa keluar yang direbut TKA sekitar US\$ 3 milyar.

Berbagai rangkaian keadaan tersebut mencerminkan terdapat semacam "Paradoks Dunia Kerja Indonesia", yang menuntut penanganan terencana, terkoordinasi dan teragendakan secara jelas dan bukannya dengan sekedar pekerjaan sampingan atau tambal-sulam. Untuk itu agaknya sudah menjadi urgensi nasional untuk mengagendakan reformasi kebijakan ketenagakerjaan (*labor policy*) Indonesia terlebih-lebih dalam menghadapi era pasar bebas setidaknya meliputi:

Pertama, reformasi pola investasi dan pertumbuhan ekonomi yang bersifat *full employment*, anti ketimpangan dan pengangguran.

Kedua, reformasi pendidikan dan pelatihan pekerja yang berorientasi pasar kerja (*labor market oriented*).

Ketiga, reformasi pasar kerja Indonesia baik pasar domestik maupun internasional.

V. PRODUKTIVITAS, DAYA SERAP DAN UPAH TENAGA KERJA

A. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Dalam pertumbuhan ekonomi salah satu sumbernya adalah berasal dari tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang menjadi kebutuhan pertumbuhan ekonomi tergantung pada daya serap lapangan usaha yang menghasilkan nilai tambah. Setiap terjadi peningkatan nilai tambah berarti akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja mencerminkan ukuran seberapa jauh sumber daya manusia pekerja didayagunakan dengan baik di dalam suatu proses produksi yang menghasilkan nilai tambah.

Untuk menghitung produktivitas tenaga kerja, output yang digunakan adalah PDB masing-masing lapangan usaha, dengan input adalah tenaga kerja sendiri.

Rumus:

$$P_{TK} = \frac{\Delta PDB}{\Delta TK} \dots \dots \dots (V.1)$$

dimana: P_{TK} = Tingkat produktivitas tenaga kerja
 ΔPDB = Laju pertumbuhan PDB (%)
 ΔTK = Laju pertumbuhan TK (%)

TABEL 6
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
MENURUT SEKTOR/ LAPANGAN USAHA
1980-1994

Lapangan Usaha	1980	1985	1990	1994
1. Pertanian	2,17	0,97	3,35	1,67
2. Pertambangan	0,53	1,94	0,41	3,20
3. Industri	2,08	1,81	2,23	1,37
4. Listrik, Gas dan Air	1,64	12,87	0,27	1,88
5. Bangunan	1,52	0,67	1,20	2,37
6. Perdagangan	1,72	0,56	3,40	1,30
7. Angkutan	2,43	1,52	1,22	1,19
8. Bank & Lembaga Keuangan	0,87	3,79	0,68	5,75
9. Jasa-jasa	1,88	3,03	1,65	2,16
Rata-rata	1,42	0,95	2,73	2,01

Dari hasil perhitungan produktivitas tenaga kerja dalam periode 1971-1994 seperti terlihat pada Tabel 6 dapat diperoleh gambaran antara lain bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja periode 1971-1980, rata-rata nasional adalah 1,42 dan pada periode 1990-1994 meningkat menjadi 2,01. Tinjauan secara sektoral akan menunjukkan berbagai variasi. Misalnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian pada periode yang sama menurun dari 2,17 menjadi 1,67; perkembangan meningkat dari 0,53 menjadi 3,2; industri menurun dari 2,08 menjadi 1,37; listrik, gas dan air meningkat dari 1,64 menjadi 1,83; bangunan meningkat dari 1,52 menjadi 2,37; Bank dan lembaga keuangan meningkat paling signifikan dari 0,87 menjadi 5,75. Data ini sekaligus dapat meluruskan sementara pandangan seolah-olah produktivitas pekerja Indonesia mengalami stagnasi atau rendah seolah tanpa kemajuan apa-apa.

B. DAYA SERAP PASAR KERJA DAN ELASTISITAS TENAGA KERJA

Semakin tinggi elastisitas tenaga kerja semakin tinggi pula daya serap tenaga kerja dalam suatu lapangan usaha. Rumus untuk menghitung elastisitas tenaga kerja adalah:

$$E_{TK} = \frac{\Delta TK}{---$$

ΔPDB

dimana: E_{TK} = Elastisitas tenaga kerja

ΔTK = Laju pertumbuhan tenaga kerja (%)

ΔPDB = Laju pertumbuhan PDB (%)

Daya saing tenaga kerja menentukan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap melalui elastisitas tenaga kerja (*labor elasticity*). Sedangkan elastisitas tenaga kerja sangat bergantung kepada nilai tambah yang dihasilkan. Dengan demikian elastisitas tenaga kerja mencerminkan daya serap sejumlah tenaga kerja pada setiap perubahan nilai tambah. Makin tinggi elastisitas tenaga kerja berarti semakin tinggi pula tingkat daya serap pasar kerja pada perekonomian dan sektor-sektor lapangan usaha. Namun jika daya serap tenaga kerja meningkat maka produktivitas rata-rata akan menjadi rendah. Sebaliknya rendah atau menurunnya elastisitas tenaga kerja makin rendah pula tingkat daya serap pasar kerja.

Dari aspek ini maka dalam kondisi ekonomi yang *labor surplus economy* semakin dituntut suatu kearifan para pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang lebih tepat dengan pilihan yang sulit antara mengutamakan elastisitas tenaga kerja atau produktivitas tenaga kerja, dalam kondisi sumber investasi yang terbatas.

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus di atas diperoleh perkembangan elastisitas tenaga kerja menurut lapangan usaha seperti terlihat dalam **Tabel 7**.

Elastisitas tenaga kerja rata-rata secara total menurun dari 0,70 (periode 1975-1980) menjadi 0,50 (periode 1990-1994). Secara umum penurunan ini dicerminkan pula secara sektoral. Dari 9 sektor/ lapangan usaha, 5 diantaranya mengalami penurunan, sedangkan hanya 4 sektor yang mengalami kenaikan. Misalnya elastisitas tenaga kerja sektor pertanian pada periode yang sama sedikit meningkat dari 0,46 menjadi 0,60; pertambangan menurun drastis dari 1,89 menjadi 0,31; industri

meningkat dari 0,48 menjadi 0,73; listrik, gas dan air menurun dari 0,61 menjadi 0,55; bangunan menurun dari 0,66 menjadi 0,42; Bank dan lembaga keuangan menurun drastis dari 1,15 menjadi 0,17.

TABEL 7
ELASTISITAS TENAGA KERJA
MENURUT SEKTOR/LAPANGAN USAHA
1980 - 1994

Lapangan Usaha	1980	1985	1990	1994
1. Pertanian	0,46	1,03	0,30	0,60
2. Pertambangan	1,89	0,52	2,44	0,31
3. Industri	0,48	0,55	0,45	0,73
4. Listrik, Gas dan Air	0,61	0,08	3,70	0,55
5. Bangunan	0,66	1,49	0,83	0,42
6. Perdagangan	0,58	1,79	0,29	0,77
7. Angkutan	0,41	0,66	0,82	0,84
8. Bank & Lembaga Keuangan	1,15	0,26	1,47	0,17
9. Jasa-jasa	0,53	0,33	0,61	0,46
Rata-rata	0,70	1,05	0,37	0,50

Sumber: Pasaribu, Bomer. 1995. Diolah dari berbagai sumber data BPS dan DEPNAKER

Realitas penurunan elastisitas tenaga kerja secara nasional yang juga mencerminkan tingkat daya serap pasar kerja yang cenderung menurun terasa paradoksal bila dikaitkan dengan kenaikan total investasi sekitar 8000% dalam periode yang sama disertai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cenderung meningkat. Peningkatan ini justru berlawanan dengan kecenderungan menurunnya laju pertumbuhan tenaga kerja dari 3,47% per tahun periode 1980-1990 menjadi 3,37% periode 1990-1994, apalagi dalam suasana ledakan tenaga kerja dan meningkatnya tingkat partisipasi kerja (*participation rate*) terlebih lebih pekerja wanita.

Keadaan paradoksal ini semakin memperjelas "Paradoks Dunia Kerja Indonesia" sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV. Jelas penciptaan lapangan kerja baru semakin sulit dan mahal berhadapan dengan tingkat partisipasi pekerja terlebih-lebih wanita yang "menyerbu" pasar kerja terus meningkat. Sehingga menimbulkan bahaya pengangguran yang sudah memasuki "lampu kuning menuju merah" pada 1996 diperkirakan sekitar 7,7% (1996) pengangguran terbuka naik dari hanya 3,1% (1992). Bahkan pengangguran terselubung meningkat dari "hanya" 36% pada 1994 diperkirakan menjadi 46% pada 1996. Keadaan semakin rawan karena para penganggur semakin berpendidikan antara lain lebih dari 40%, lulusan perguruan tinggi adalah penganggur terbuka. Kerawanan ini tidak hanya berdampak sosial ekonomi tetapi bisa berdimensi banyak seperti kerawanan sosial politik, keamanan, keresahan sosial, kriminilitas dan sebagainya.

C. KONTROVERSI UPAH

Dalam Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 1990 yang diterbitkan oleh BPS dapat dipelajari perkembangan tingkat upah pekerja Indonesia. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata upah dan gaji pertahun dari pekerja Indonesia relatif rendah. Bukan hanya upah minimum regional (UMR) tetapi juga tingkat upah rata-rata pekerja Indonesia termasuk sangat rendah di Asia kecuali terhadap Bangladesh, Nepal dan lain-lain. Bahkan dalam struktur biaya rata-rata *labor cost* Indonesia sangat rendah hanya sekitar 7-9% dari total *unit cost*. Menaikkan upah pekerja Indonesia menjadi cukup sulit karena berhadapan dengan besarnya apa yang sering diketengahkan sebagai *invisible cost*, *collution cost*, *free rider cost*, *rent seeking cost* dan semacamnya yang besarnya bisa 2-3 kali lipat dari *labor cost*.

Rata-rata upah dan gaji per tahun meskipun relatif rendah namun terus mengalami peningkatan. Jika pada 1975 rata-rata upah dan gaji tersebut adalah Rp. 112.690 maka pada 1990 sudah menjadi Rp. 1.297.230. Diantara golongan tenaga kerja penerima upah dan gaji, tenaga kerja profesional, tehnisi, manajer dan militer memperoleh upah dan gaji tertinggi. Sebaliknya tenaga kerja pertanian menerima upah dan gaji yang rendah.

Perbandingan upah dan produktivitas Indonesia termasuk yang terendah diantara negara-negara berkembang NIEs (*Newly Industrializing Economies*) Asia yang mencerminkan penghargaan

terhadap pekerja Indonesia masih sangat terpengaruh oleh paradigma: "Upah buruh sangat murah sebagai keunggulan komparatif" seperti tercermin dalam Tabel 8.

TABEL 8
RASIO RATA-RATA UPAH DAN PRODUKTIVITAS
PEKERJA ASIA
1990

1. HONG KONG	56.0%
2. TAIWAN	40.6%
3. KOREA	28.3%
4. PHILIPINE	26.7%
5. THAILAND	26.0%
6. SINGAPORE	25.6%
7. MALAYSIA	25.0%
8. INDONESIA	18.6%

Sumber: Pasaribu, 1995. Diolah dari berbagai sumber.

Dari Tabel ini terlihat bahwa penghargaan dalam bentuk upah terhadap pekerja Indonesia adalah terendah diantara 8 negara. Bila pekerja menghasilkan 100 produktivitas maka pekerja Indonesia menerima bagian upahnya 18,6, sementara pekerja Philipina menerima 26,7. Seandainya produktivitasnya dilipatgandakan 10 kali lipat menjadi 1000, pekerja Indonesia hanya menerima bagian upahnya 186, sedangkan pekerja Philipina 267.

VI. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

A. KESIMPULAN

1. Sukses besar pembangunan dan *booming* ekonomi Indonesia ternyata telah melahirkan sejumlah tuntutan dan persoalan-persoalan baru khususnya di bidang ketenagakerjaan. Berbarengan dengan makin gencarnya era liberalisasi ekonomi dimana akselerasi transformasi struktur ekonomi akan makin cepat berpacu memasuki industrialisasi, Indonesia akan menghadapi persoalan semakin berat dan rumit di bidang ketenagakerjaan sekalipun berbagai indikator

ekonomi makro akan menunjukkan perkembangan yang meningkat dan menggembirakan namun disana-sini ditandai dengan berbagai ketimpangan struktural.

2. Berlawanan dengan investasi yang meningkat berlipat ganda sekitar 8000% dari 1980-1994 disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cenderung meningkat sekitar 7% per tahun justru elastisitas tenaga kerja dan daya serap pasar kerja menurun, ICOR makin meningkat, dan adanya berbagai penyakit "kanker" ekonomi biaya tinggi menyebabkan semakin sukarnya penciptaan lapangan kerja baru dan semakin mahalnya investasi. Di samping itu ledakan angkatan kerja yang makin berpendidikan dan tingkat partisipasi yang makin tinggi "menyerbu" pasar kerja semakin berhadapan pula dengan makin meningkat masuknya tenaga asing di Indonesia sebagai konsekuensi ketimpangan pasar kerja terdidik dan tidak terdidik dan makin maraknya keterbukaan ekonomi dan investasi asing yang secara logis akan diikuti oleh masuknya tenaga kerja asing pula. Kesemuanya mencerminkan "Paradoks Dunia Kerja Indonesia".
3. Selain itu masalah kualitas dan produktivitas kerja, masalah pengupahan makin meningkatnya tuntutan kebutuhan dan harga diri termasuk penegakan hak asasi dan hak ekonomi kaum pekerja menimbulkan tambahan pekerjaan rumah bagi penanganan ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia yang juga makin kompleks.
4. Dalam memasuki era pasar bebas dari sudut ketenagakerjaan kita tetap optimis asal "PR" yang cukup banyak dipersiapkan dan ditanggulangi secara konsekuen dan *all out* melalui serangkaian reformasi kebijakan agar keunggulan absolut dan komparatif (*absolute and comparative advantages*) yang kita miliki dapat ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) di dalam era pasar bebas.

B. SARAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Perlu dipelajari secara mendalam dan menyeluruh segala seluk beluk dunia ketenagakerjaan dan pasar kerja ("taksonomi dunia kerja") Indonesia terutama oleh para pengambil keputusan dan para pelaku ekonomi melalui suatu studi dan penelitian yang sungguh-sungguh untuk penyiapan langkah-langkah dan kebijakan konkrit.

2. Selanjutnya diperlukan reformasi kebijakan (*labor policy*) setidaknya meliputi:

Pertama, reformasi pola investasi dan sumber pertumbuhan ekonomi yang bersifat *full employment*, anti ketimpangan dan pengangguran.

Kedua, reformasi pendidikan dan pelatihan pekerja yang berorientasi pasar kerja (*labor market oriented*), seraya mencegah pendidikan dan pelatihan yang justru memperluas pengangguran terdidik.

Ketiga, reformasi pasar kerja Indonesia yang bersifat dualistik baik pasar domestik dan internasional, pasar kerja formal dan informal, pasar kerja terdidik dan tidak terdidik, pasar kerja primer dan sekunder.

Keempat, reformasi sistem pengupahan yang berorientasi pada peningkatan harkat pekerja dan produktivitas.

Kelima, reformasi sistem hubungan industrial yang lebih memberdayakan kaum pekerja sehingga memiliki kekuatan tawar (*bargaining power*) yang lebih sehat dan seimbang dengan lebih memperhatikan harkat, hak asasi dan ekonomi kaum pekerja sepadan dengan kewajibannya.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Affendi. 1996. Pentingnya Peranan Etika dalam Pembangunan Ekonomi. (Naskah yang akan dipublikasikan). Jakarta.
- Backer, G.S. 1980. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, With Special Reference to Education. Second Edition*. The University of Chicago Press, Chicago.
- Biro Pusat Statistik. Pendapatan Nasional Indonesia 1969-1994. Berbagai seri penerbitan. Jakarta.
- Biro Pusat Statistik. 1991. *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri 1980-1990*. Jakarta.
- Biro Pusat Statistik. 1995. Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-propinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 1988-1993. Jakarta.
- Biro Pusat Statistik. Survei Angkatan Kerja Nasional 1994. Jakarta.
- Chenery dan Ahluwalia, S. 1974. *Redistribution With Growth*. Oxford University Press, New York.
- Chenery dan M. Syrquin. 1988. *Industrialization and Growth*. Oxford University Press, London.
- D'Aveny, R.A. 1994. *Hyper Competition: Managing the Dynamic Maneuvering*. Maxwell Macmillan, New York.
- Departemen Tenaga Kerja. 1995. Studi Perkembangan Upah dan Lapangan Kerja di Berbagai Cabang Industri. Puslitbang DEPNAKER, LPUI, Jakarta.
- Haq, Khadija dan Kirdar, Uner. 1986. *Human Development. The Neglected Dimension*. North South Roundtable, Islamabad.
- International Labor Organization. 1995. *Indonesia: Social Adjustment Through Sound Industrial Relations and Labor Protection*. Jakarta.
- Korten D.C., Sjahrir. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Terjemahan. *People Centered Development*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Lampert, Heinz. 1994. Ekonomi Pasar Sosial: Tataan Ekonomi dan Sosial Republik Federasi Jerman. Terjemahan. Puspa Swara dan Konrad-Adeneur-Stiftung, Jakarta.

Pasaribu, Bomer. 1993. *Manpower Training in Indonesia's Economic Development*. Makalah pada *Regional Tripartite Workshop on Social Dimensions of Economic Reform in Asia* (ILO & UNDP). Katmandu, Nepal:24-26 Agustus 1993.

_____. 1994. *Human Resources Development in Indonesia's Economic Development in the Sixth Five-Year Development Plan (Repelita VI)*. Makalah pada *ILO Tripartite Workshop on Human Resoueces Development and International Competitiveness in ASEAN Countries*. Manila 12-13 Desember 1994.

_____. 1994. Memasuki PJP II, Reformasi Politik Ketenagakerjaan, Paradigma : Demokratisasi, Integrasi dan Keadilan. Didalam . Hubungan Industrial dan Organisasi Ketenaga Kerjaan. Djoko Pitojo (ed.) Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) , Jakarta.

_____. 1994. Perwujudan Hak Berserikat dan Berunding dalam Hubungan Industrial Pancasila. Didalam. Membangun Hubungan Industrial Pancasila. Adi Sasono (ed.) Departemen Tenaga Kerja dan CIDES , Jakarta.

_____. 1995. Dunia Kerja dan Perspektif Hubungan Industrial Era Industrialisasi dan Liberalisasi Ekonomi Pasar. Pembangunan Kelembagaan: Pemberdayaan, Kemitraan dan Kesejahteraan. LEM, Jakarta.

_____. 1995. *Trade Union Movement for the Construction of Democratic Welfare Society : Reformation and Restructuring of Indonesia Trade Union Movement Period 1995-2000*. Makalah pada *International Symposium on Trade Union Work in Overseas - Funded Enterprises*, Beijing 25-30 April 1995.

_____. 1996. Menampilkan Seutuhnya Wajah Pekerja Indonesia. Di dalam . Prisma No.7. Pustaka LP3S Indonesia, Jakarta
World Bank, the. 1993. *World Development Report 1993*. Oxford University Press, New York.

LAMPIRAN
KLASIFIKASI KELOMPOK BESAR INDUSTRI

KELOMPOK INDUSTRI² DIGIT ISIC

1. 31 = Industri makanan, minuman dan tembakau.
2. 32 = Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit.
3. 33 = Industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga dari kayu.
4. 34 = Industri kertas dan barang-barang dari kertas percetakan dan penerbitan.
5. 35 = Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan barang-barang dari plastik.
6. 36 = Industri barang-barang galian bukan logam kecuali barang-barang dari minyak bumi dan batu bara.
7. 37 = Industri logam dasar =Basic metal industri.
8. 38 = Industri barang-barang dari logam , mesin dan perlengkapannya.
9. 39 = Industri pengolahan lainnya.